

AGENDA CAPRES/CAWAPRES 2014-2019: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL¹

V.L. Sinta Herindrasti
Herindrasti@yahoo.com

Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia biasanya merupakan “peristiwa politik” yang sangat “heboh”. Jauh hari sebelum hari “H” pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara), media sosial baik surat kabar maupun elektronik sudah menempatkannya dalam *headline* baik dalam bentuk *news* maupun ulasan dengan mengundang para pakar, baik pakar politik, komunikasi, ekonomi, hukum dan sebagainya. Itulah barangkali mengapa pemilu di Indonesia lebih populer disebut “pesta demokrasi” – karena rakyat dalam lima tahun sekali merayakan suatu praktek demokrasi yang melibatkan ratusan juta warga dari Sabang sampai Merauke dengan segala kompleksitas proses pelaksanaannya.

Mengapa pemilu di Indonesia demikian menarik perhatian? Bagi para ilmuwan sosial, secara umum Indonesia selalu menjadi obyek *test case* apakah demokrasi yang notabene adalah paradigma dari luar dapat berjalan di Indonesia, sebuah negara majemuk, dimana secara ekonomi sedang berkembang dengan mayoritas penduduk muslim dan apakah demokrasi dapat bergerak “maju” tidak sekedar formalitas tapi esensial dimana pengalaman pemerintahan yang otoritarian, sentralistis berbasis militer tidak akan kembali lagi “mengeser” supremasi sipil.

Fakta bahwa ada tiga aliran politik fundamental (nasionalis, agama dan komunis) pada masyarakat Indonesia di masa lampau menjadikan perubahan profil dan orientasi pemilih muda menarik untuk diamati – sesuatu yang secara signifikan akan merubah potret Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.

Dalam pemilu kali ini banyak faktor pembeda yang menarik dari pemilu sebelumnya, antara lain hanya ada 2 calon yang secara latar belakang sangat kontras yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hata Rajasa serta pasangan no urut 2 Djoko Widodo (Djokowi)

¹ Dipresentasikan pada acara Diskusi Panel Calon Presiden RI 2014-2019 “Menyiasati Agenda Capres/Cawapres 2014-2019” di Gedung Grha William Suryajaya, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2014.

dan Yusuf Kalla. Prabowo adalah bagian dari “vested” masa lampau, yaitu rejim Orde Lama dimana Presiden Soeharto menjadi legenda karena dominasinya; sedang Jokowi adalah “newcomer” representasi wong cilik dimana karier politiknya melesat bak meteor, dari seorang ‘bukan siapa-siapa’, pengusaha mebel, menjadi walikota Solo dengan berbagai “gebrakan” kebijakan yang pro-rakyat, kemudian berhasil menjadi gubernur Jakarta mengalahkan Fauzi Wibowo. Prabowo berasal dari keluarga intelek, kelas atas dengan fasilitas pendidikan luar negeri, sementara Jokowi adalah rakyat biasa, dari keluarga tukang kayu sederhana, berjuang untuk pendidikannya dan kemudian berhasil menapak menjadi pengusaha mebel yang sukses.

Pemilu 2014 juga ditandai dengan melemahnya partai berbasis agama (PKS, PPP), dimana partai berbasis nasionalisme menjadi lebih eksis yang berkembang dengan berbagai variannya. PDIP misalnya dengan nasionalisme Soekarnonya, tampil bersama partai Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem) serta partai-partai dari eks purnawirawan ABRI (Gerindra, Hanura) dengan bendera nasionalis pula. Hal yang lain adalah keterlibatan media sosial (*facebook, twitter*) yang demikian masif, secara signifikan akan menyumbang perolehan suara bagi masing-masing calon serta adanya debat capres maupun cawapres yang memungkinkan penilaian secara luas (tidak hanya nasional tapi internasional) dari publik calon pemilih. Efek media sosial dengan figur beritanya dalam pemilu Indonesia 2014 sudah merupakan “kehendak jaman” dimana di belakang fenomena tersebut terlibat kemampuan intelegensi generasi muda Indonesia yang sudah sangat melek teknologi.

Tentu ada yang lebih penting dari segala sarana sosialisasi dan komunikasi (*tools*) tersebut, yaitu substansi program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Lepas dari apakah masyarakat kebanyakan mampu mengkritisi program pembangunan yang ditawarkan dalam 5 tahun ke depan – dan tidak sekedar menilai penampilan luar calon --, namun satu kecenderungan di masa depan perlu dicermati adalah akan semakin banyak elemen masyarakat yang memilih berdasarkan “program-program” yang rasional sesuai dengan *interese* rakyat/publik yang secara umum menuntut pemenuhan kesejahteraan.

Paper ini akan lebih menyorot program kedua pasangan dari perspektif Ilmu Hubungan Internasional, dengan mempertanyakan apakah Visi Misi dan Program Aksi kedua calon pasangan sudah mencakup kepentingan Indonesia di bidang hubungan internasional dan bagaimana kedua calon melalui programnya memformulasikan kepentingan tersebut. Termasuk

apakah program politik luar negeri Indonesia “*make sense*” (masuk akal) dari perspektif ilmu hubungan internasional.

Visi misi dan program Prabowo-Hatta 2014

Dalam program 9 halamannya pasangan no 1 mengawali dengan pembukaan uraian yang sifatnya normatif yaitu *peningkatan pencapaian reformasi dan demokrasi di berbagai bidang secara menyeluruh, merata dan berkelanjutan.*² Dengan visi “membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat”, Prabowo-Hatta mengemban misi (1) mewujudkan NKRI yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945; (2) mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan dan mandiri, (3) mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif dan trampil. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut melalui agenda dan program nyata menyelamatkan Indonesia dijabarkan 8 program pokok, yaitu (1) membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur yang terdiri dari 12 aksi; (2) melaksanakan ekonomi kerakyatan terdiri dari 8 aksi; (3) membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumberdaya alam (11 aksi); (4) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan (9 aksi); (5) meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga (9 aksi); (6) mempercepat pembangunan infrastruktur (11 aksi); (7) menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup (8 aksi) dan (8) membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani.³

Dari keseluruhan uraian visi, misi dan program terasa agak sulit meraba arah politik luar negeri Indonesia yang akan diimplementasikan, karena minimnya formulasi eksplisit mengenai hal tersebut. Masyarakat ASEAN sempat disebut dalam kaitannya dengan “... *memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan persaingan global ...*”⁴ dan “..*melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia dan meningkatkan peran*

² Visi, Misi dan Program Bakal pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden, hal 1

³ Ibid., hal 1-8.

⁴ Ibid., hal 3.

serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia”.⁵ Pandangan Prabowo mengenai persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN terungkap dalam debat, “... Kita akan memberi fasilitas, insentif dan dukungan kepada perusahaan, tetapi tanpa melanggar peraturan. Selain itu juga harus diberikan pendidikan, perizinan yang dipermudah, kredit dipermudah..”⁶. Namun visi strategis dalam kaitan kebijakan regional dan internasional kurang eksplisit sehingga menimbulkan kesan politik luar negeri dalam visinya tidak begitu dielaborasi. Apa makna politik luar negeri bagi Prabowo-Hatta? Bagaimana prinsip bebas-aktif akan diimplementasikan dalam lingkungan konkrit dengan berbagai konstelasi kekuatan? Terkesan bagi Prabowo ASEAN tidak begitu penting, padahal perspektif hubungan internasional melihat ASEAN justru sangat vital, sebagai “ruang hidup” (*lebensraum*) Indonesia; dimana Indonesia tanpa ASEAN belum tentu dapat “*survive*”. Agak berbeda dengan Jokowi yang dalam menghadapi pasar bebas ASEAN menawarkan dua strategi. Pertama adalah dengan mempercepat pembangunan pusat-pusat pelatihan keterampilan sebagai investasi sumber daya manusia. Langkah kedua, mengoptimalkan Duta Besar Indonesia di kawasan Asia Tenggara, sebagai diplomat yang handal dalam mempromosikan barang khas Indonesia.⁷

Penekanan Prabowo terhadap perlunya melindungi integritas wilayah, sumber daya alam Indonesia – dapat mengesankan para pemimpin ASEAN akan munculnya hubungan bilateral/multilateral yang lebih tegang daripada sifat hubungan sebelumnya yang penuh konsensus tanpa keinginan mendominasi satu sama lain.⁸

Visi Misi dan Program Jokowi – Jusuf Kalla 2014

Judul buku putih program pasangan no 2 adalah “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Beda, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014” diterbitkan pada Mei 2014 setebal 41 halaman. Dibuka dengan statement pendahuluan yang menegaskan bahwa “...16 tahun setelah reformasi 1998 yang menjanjikan Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat, jalan menuju pemenuhan semakin terjal dan penuh ketidakpastian...Indonesia terbelenggu dalam transisi yang

⁵ Ibid., hal 9.

⁶ Lih dalam “ini Pandangan Prabowo dan Jokowi soal ASEAN Economic Community dalam www.merdeka.com/peristiwa/ini-pandangan-prabowo-dan-jokowi-soal-asean-economic-community.html

⁷ <http://www.merdeka.com/uang/beda-jokowi-dan-prabowo-hadapi-pasar-bebas-asean.html>

⁸ <http://blogs.cfr.org/asia/2014/06/26/prabowo-jokowi-and-foreign-policy/>

berkepanjangan...”.⁹ Dan dilanjutkan dengan uraian tiga problem pokok bangsa, yaitu (1) ancaman terhadap wibawa negara, (2) kelemahan sendi perekonomian bangsa dan (3) intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.¹⁰ Untuk bertahan dari deraan gelombang sejarah, pasangan Jokowi-Kalla ingin meneguhkan kembali jalan ideologis bangsa sebagai penuntun, penggerak, pemersatu dan pengarah yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Jika Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar sekaligus arah dalam membangun jiwa bangsa; maka Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi *terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong* akan ditempuh melalui 7 butir misi, yaitu (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.¹¹

Adapun agenda yang ditawarkan adalah 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian

⁹Lihat dalam *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014*. Jakarta, Mei 2014. Hal 1.

¹⁰ Lih ibid., hal 1-2 Mengenai ancaman terhadap wibawa negara diuraikan “...wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakkan hukum dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak mempunyai kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan public terhadap perubahan kearah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan, yang lebih member keuntungan bagi perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi kepentingan nasional..”

¹¹ Ibid., hal 6

dalam kebudayaan. Dari 31 agenda strategis itu diperas lagi dalam 9 agenda prioritas (Nawa Cita), yaitu (1) menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (2) akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.¹²

Dari berbagai agenda yang ditawarkan, dari perspektif Hubungan Internasional terdapat beberapa catatan yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan keinginan untuk membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Dalam hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia akan dijalankan dengan memberi penekanan pada 4 prioritas utama, yaitu identitas sebagai negara kepulauan, meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power*, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik serta politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat.

Pertama, berdaulat di bidang politik dan politik luar negeri bebas aktif: bagaimana visi ini hendak direalisasikan dalam kerangka “*positioning*” regional Asia Tenggara dan Indo Pasifik dimana dalam kenyataan lingkungan strategis antara dua samudera tersebut (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) tidak “vakum” dari kekuatan regional/global negara-negara besar? Bagaimana berdaulat akan kita interpretasikan? Apakah dapat diartikan netral/tidak pro negara adidaya seperti Amerika, Cina, India. Dengan kata lain bagaimana konkritisasi “politik LN bebas aktif” dalam konstelasi yang sangat dinamis (berubah dengan cepat) yang terkadang tidak semakin memberi ruang bagi manuver yang lebih bebas bagi Indonesia: di tengah meningkatnya “power” dan pengaruh Cina di Asia Tenggara/Asia Pasifik, lemahnya anggota ASEAN menghadapi klaim Laut Cina Selatan oleh Cina dan berkembangnya aliansi besar di Asia yaitu *China-led alliances* dan *US-led alliances*? Konstelasi Indo-Pasifik pun tidak kalah

¹² Ibid., hal 6-11

“dinamis”, dimana kekuatan laut India, Cina dan Amerika Serikat telah menunjukkan eksistensinya termasuk Australia.¹³ Memperluas mandala Indo Pasifik juga berarti perlunya penyiapan sumber daya manusia termasuk ahli-ahli di kawasan ini; yang dalam kaitan dengan program studi Hubungan Internasional berarti perlunya perubahan fokus pada kurikulum untuk menyiapkan kompetensi yang relevan baik dari segi strategik maupun dari perspektif maritim.

Kedua, meningkatkan peran global melalui diplomasi “*middle power*”. Statement ini juga banyak menimbulkan pertanyaan kritis “*middle power*” seperti apa yang dimaksudkan, karena terdapat berbagai pengertian oleh para ahli hubungan internasional. *Middle power* lebih dalam pengertian militer, sumber daya, indikator ekonomi, penduduk atau lebih dalam pengertian perilaku dengan peran khusus misalnya sebagai katalis, fasilitator, pembangun koalisi, setting agenda, membangun lembaga, kredibilitas (Cooper, 1993) atau menurut Daniel Flemes (2007) negara yang ditandai dengan tingkat kekuatan militer tertentu, sumber daya, posisi strategis dimana kekuatannya cukup dipandang oleh *great power*, *super power* dan *regional power*?¹⁴ Bagi Indonesia, apakah sumber daya aktual kita sudah menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan “*middle power*”? Baik dari segi sumber daya maupun peran khusus dalam memajukan kerja sama dengan berbagai organisasi multilateral, inisiator penyelesaian konflik yang untuk itu memerlukan bukti dari berbagai penyelesaian masalah dalam negeri.

Ketiga, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai *image*. Bagaimanapun Indonesia dilihat oleh dunia internasional sebagai negara berpenduduk Muslim besar, termasuk 3 besar dunia yaitu Indonesia (182.570.000), Pakistan (134.480.000) dan India (121.000.000). Muslim Indonesia adalah 12,7% dari total Muslim dunia sebesar 1,6 milyar. Dengan adanya berbagai praktek intoleransi yang dilakukan oleh kelompok fundamental yang radikal tanpa adanya tindakan tegas dari aparat -- kasus Poso, konflik Ambon, kekerasan agama di Sleman, pemberlakuan Syariah Islam, kasus Ahmadiyah dan kebebasannya Ustadz Jafar Umar Thalib eks narapidana kasus Ambon dan pimpinan lasykar JI yang bebas berbicara dengan semangat fundamentalis -- akan menimbulkan pertanyaan wajah Islam yang bagaimanakah yang akan

¹³ India sebagai kekuatan ekonomi ketiga di Asia dan pembelanja pertahanan keempat sesudah AS, China, Jepang di Indo Pasifik merupakan aktor yang patut diperhitungkan. Sementara Australia juga menempatkan kawasan Indo pasifik sebagai kawasan strategis. Lih <http://thediplomat.com/2012/11/the-new-triangular-diplomacy-india-china-and-america-on-the-high-seas/>; <http://thediplomat.com/2013/04/returning-to-the-land-or-turning-toward-the-sea-indias-role-in-americas-pivot/>; <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/12/us-pivot-the-future-indo-pacific-region-part-1-2.html>

¹⁴ Lihat Lina A. Alexandra, “Becoming a ‘middle power’”. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/28/becoming-a-middle-power.html>.

ditampilkan oleh Indonesia kepada dunia? Kebijakan dan diplomasi seperti apa yang akan dibawakan oleh pemerintah baru dalam kaitannya dengan pluralitas?

Penutup

Banyak pertanyaan muncul dalam mempelajari visi misi dan program kedua calon presiden Indonesia 2014-2019 baik dari dokumen tertulis maupun penampilan calon dalam debat calon presiden. Ada berbagai kemungkinan yang terjadi, mengapa visi misi terkesan tidak utuh menyeluruh. Barangkali terkait pendeknya persiapan dari saat keputusan pencalonan hingga masa kampanye (meskipun tidak demikian bagi Prabowo) atau memang perspektif politik luar negeri dan hubungan internasional calon yang belum matang.

Jika politik luar negeri secara umum dipahami sebagai seperangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam percaturan politik internasional; maka visi ini tidak kita dapatkan secara komprehensif dari kedua calon. Politik luar negeri juga dapat dilihat sebagai hasil interaksi negara dengan lingkungan internal dan eksternalnya dan selalu terbentuk dari persepsi domestik/internasional yang ada pada saat perumusannya. Dalam pengertian ini, kedua calon juga tidak menunjukkan konsep dan pengalaman intensif. Desain politik luar negeri tidak mampu dihadirkan secara utuh oleh kedua calon, sehingga publik dapat “membaca” dan “memahami” konsep yang akan mereka aplikasikan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua calon pasangan presiden Indonesia 2014-2019, bagi publik yang tertarik mengenai strategi dan politik luar negeri atau mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin mempelajari visi calon pemimpin akan mendapatkan manfaat lebih melalui debat calon presiden Amerika Serikat atau parlemen Inggris – karena di negara tersebut calon benar-benar “menguasai” berbagai isu negaranya dan bagaimana tujuan nasional akan dicapai.

Dengan kata lain, calon presiden Indonesia masih perlu banyak membaca, belajar dan terjun langsung dalam berbagai aspek dimensi pembangunan bangsa sehingga rakyat tidak “malu” tetapi menjadi bangga akan pemimpinnya.

Daftar Rujukan

Araf, Al dan Diandra Megaputri, *Homework for the next president in the SSR Agenda*. The Jakarta Post, June 5, 2014.

Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014. Jakarta, Mei 2014.

Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo -Hatta

Wirajuda, Hadianto. *The Prospects for Indonesian Foreign Policy*. The Jakarta Post May 30, 2014.

www.merdeka.com/peristiwa/ini-pandangan-prabowo-dan-jokowi-soal-asean-economic-community.html

<http://www.merdeka.com/uang/beda-jokowi-dan-prabowo-hadapi-pasar-bebas-asean.html>

<http://blogs.cfr.org/asia/2014/06/26/prabowo-jokowi-and-foreign-policy/>

[http://thediplomat.com/2012/11/the-new-triangular-diplomacy-india-china-and-america-on-the-high-seas/;](http://thediplomat.com/2012/11/the-new-triangular-diplomacy-india-china-and-america-on-the-high-seas/)

[http://thediplomat.com/2013/04/returning-to-the-land-or-turning-toward-the-sea-indias-role-in-americas-pivot/;](http://thediplomat.com/2013/04/returning-to-the-land-or-turning-toward-the-sea-indias-role-in-americas-pivot/)

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/12/us-pivot-the-future-indo-pacific-region-part-1-2.html>

<http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/28/becoming-a-middle-power.html>.